

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Alamat Kantor :JL. NEGARA LINTAS TIMUR KM. 112 TIYUH TOHOU,
MENGGALE, TULANG BAWANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 telah selesai dikerjakan. Rencana Kerja Tahun 2025 ini berisikan rumusan rencana kerja satuan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026. Rencana kerja yang disepakati termasuk indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian rencana kinerja yang dibuat juga mencakup *outcome* tahun yang akan datang.

Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penugasan tentang sasaran, strategi, kebijakan program serta kegiatan-kegiatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 serta tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang.

Kami ucapkan terimakasih kepada pihak yang telah mendukung dan membantu penyelesaian penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 telah selesai dikerjakan. Demikianlah, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua.

Menggala, Desember 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

RINA KUSUMAWARDANI, S.T.P.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19721227 201001 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	17
3.3 Program dan Kegiatan	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB V PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra), maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2026. Renja adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun. Renja Dinas PPPA memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan kelompok sasaran. Renja Dinas PPPA juga mencantumkan sumber dana yang dibutuhkan.

Dokumen Renja Dinas PPPA merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan dinas. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Dinas PPPA sangat ditentukan oleh kemampuan dinas dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022
Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2023-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 ini adalah untuk memasukkan program kegiatan/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan capaian tahun berjalan 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

RENCANA KERJA DINAS PPPA TUBA

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PPPA dan Pencapaian Renstra Dinas PPPA s/d Tahun 2024

Kabupaten Tulang Bawang

Kode Rekening	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM//KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPD Kabupaten/Kota Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Dinas PPPA Th 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.051.768.226	18.362.393.223	5.040.553.975	4.265.581.855	85%	5.011.276.590	27.639.251.668	1,253380291
2 08		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							-	
2 08 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA							-	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya penatausahaan keuangan						-	
		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12.107.137.211	10.763.662.962	2.982.316.975	91%	2.971.989.590	16.440.284.080	1,357900203
		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	797.933.441	489.305.000	2.150.000	100%		491.455.000	0,615909767
		PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur						-	
		KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana perkantoran	121.212.000					121.212.000	
2 08 01 2 06		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran						-	
		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	232.180.723	557.343.400				557.343.400	2,400472325
		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	15.939.273	11.999.050				11.999.050	0,752797822
		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGENDAIAN	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengendalian	113.729.113	71.494.715				71.494.715	0,628640399
		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	131.243.306	82.000.000				82.000.000	0,62479377
		SUB KEGIATAN FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	67.884.469	44.050.000				44.050.000	0,648896583
		SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	306.265.080	218.158.085				218.158.085	0,712317855
2 08 01 2 07		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya jumlah barang penunjang urusan pemerintah daerah						-	
		SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	86.719.715	44.405.000				44.405.000	0,51205196
2 08 01 2 08		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						-	
		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	273.961.674	161.452.009				161.452.009	0,589323341
2 08 01 2 09		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya jangka waktu pengoperasian barang milik daerah						-	
		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	632.151.810	431.313.400				431.313.400	0,68229402
		SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18.102.525	15.200.000				15.200.000	0,83966187
		SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	Terpeliharanya Taman Ramah Anak	215.506.250	-				-	
2 08 02		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan						-	
2 08 02 201		KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender di Lembaga Pemerintah lingkup Kabupaten Tulang Bawang						-	
2 08 02 201 02		SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang		233.445.300				233.445.300	
2 08 02 201 03		SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	Tersusunnya Raperda tentang PUG	538.765.625	49.067.000				49.067.000	0,091072997
2 08 02 202		KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pembinaan terhadap Organisasi Wanita yang ada di Kabupaten Tulang Bawang						-	
2 08 02 202 01		SUB KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Anggota DW, GOW, Kaukus Parlemen Perempuan		808.960.500	-			808.960.500	
2 08 02 202 02		SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Organisasi Wanita di Kabupaten Tulang Bawang	1.716.828.386	558.760.000	338.324.500	58%	383.324.500	1.138.455.100	0,663115259

RENCANA KERJA DINAS PPPA TUBA

						KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kapabilitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Tulang Bawang											-	
						SUB. KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN/KOTA	jumlah organisasi perangkat daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kabupaten/kota	64.686.400	75.000.000	64.686.400	86%	75.000.000	204.372.800						
						SUB. KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	454.141.127	594.658.000	454.141.127	76%	587.783.000	1.496.065.254						
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan												-
						KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak			-									-
02	08	04				SUB. KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	913.936.146	156.421.000	254.504.000	61%	235.480.000	548.322.000	0,599956575					
						SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Peningkatan jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	344.810.000	387.556.250				387.556.250	1,123970447					
						KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan												-
						SUB. KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	486.828.619	99.812.000	109.700.000	91%	101.500.000	301.124.000	0,618542108					
						SUB. KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	129.303.750	61.495.000	80.000.000	77%	80.000.000	202.990.000	1,569869397					
						Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi korban kekerasan												-
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	331.043.461	146.027.000	74.596.000	95%	69.020.000	286.263.000	0,86472936					
																			-
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga di Kabupaten Tulang Bawang												-
						KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Tulang Bawang												-
						SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA (P3KSS)	Jumlah Kelompok P3KSS	215.506.250											0
						SUB. KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah desa DRPPA Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43.157.100	50.000.000	43.157.100	86%	50.000.000	136.314.200						
2	08	06	201			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Terpenuhinya pemenuhan hak anak												-
2	08	06	201	01		KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Partisipasi Anak dalam Pembangunan												-
2	08	06	201	02		SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Terbentuknya Forum Anak Daerah di Tingkat Kabupaten dan Kampung	473.179.746	836.941.100	329.304.500	100%	307.179.500	1.473.385.200	3,113795999					
2	08	07				SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	571.098.028	371.232.000				371.232.000	0,650032012					
2	08	07	201			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak												-
						KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pengetahuan ASN dan Masyarakat Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak												-
2	08	07	201	02		SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK	Jumlah dokumen advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan keekrasan terhadap anak	82.236.500	150.000.000	82.236.500	55%	150.000.000	314.473.000						
						SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	646.518.750	569.942.700				569.942.700	0,881556335					
						KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak												-
						SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah anak yang mendapatkan layanan	86.202.500											0
						KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kompetensi SDM Layanan												-
						SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	129.303.750											0

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	target	realisasi
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	90,71	90,26
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	64,56	66,97
2	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	nilai	60,17	-
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	predikat	737	729,5
		Menurunnya Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Rasio KDRT	nilai	0,01	0,08
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan		Nilai Reformasi Birokrasi	predikat	BB	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	nilai	67,66	73.35

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
Target IPG Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 ini sebesar 91,25 dan IDG Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 ini 64,72. IPG Tahun 2023 sebesar 90,26 dan IDG Tahun 2023 sebesar

66,97. Dalam mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan Rembug Desa, Pelatihan Relawan SAPA, dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di lokasi khusus DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) Tahun 2023 yaitu Kampung Mekar Jaya Kecamatan Banjar Baru. Selanjutnya, melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender tingkat Kabupaten Tulang Bawang mulai dari kegiatan Evaluasi Mandiri, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Lapangan Hingga Verifikasi Final yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dari tahapan kegiatan tersebut Kabupaten Tulang Bawang berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 dengan kategori Nindya.

2. Sasaran Meningkatnya pemenuhan hak anak.

Pada Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang Kembali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak Predikat Nindya dengan total nilai 729,5. Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan kegiatan sosialisasi kelana dan dekela di kecamatan banjar baru, rawajitu selatan dan rawajitu timur, kemudian sosialisasi dan deklarasi sekolah ramah anak di smpn 03 banjar margo, bimtek konvensi hak anak (KHA) bagi satuan pendidikan ramah anak di smpn 03 banjar margo serta melaksanakan rapat gugus tugas KLA. Selain itu melaksanakan kegiatan FAD dan Puspaga, yaitu pelaksanaan kegiatan temu anak perwakilan kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang dan pemilihan duta anak Kabupaten Tulang Bawang, pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai pelopor dan pelapor (2P). Kegiatan Puspaga yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) masuk sekolah SMA N. 1 Menggala dan SMA N. 2 Menggala.

3. Sasaran Menurunnya Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak.

Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak dilihat dari nilai Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihitung dengan menggunakan rumus jumlah kekerasan dalam rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga dikalikan seratus persen. Pada Tahun 2023 rasio kekerasan dalam rumah tangga mencapai 0.08, hal ini menunjukkan bahwa rasio kekerasan dalam rumah tangga masih melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 0,01, namun demikian penurunan rasio kekerasan dalam rumah tangga diupayakan melalui peningkatan layanan pengaduan, pendampingan dan rehabilitasi

bagi korban, juga melaksanakan kegiatan sosialisasi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 73,35 dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang. Komponen dasar manajemen kinerja yang dinilai yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dokumen yang dievaluasi adalah laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2023, dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang memperhatikan isu-isu penting yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak
2. Tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
3. Masih adanya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan
4. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
5. Masih rendahnya peran Perempuan dan Pembangunan
6. Masih belum terpenuhinya hak anak
7. Masih rendahnya partisipasi Forum Anak Daerah dalam pembangunan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel review Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 sebagai berikut:

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 4.628.783.656	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 4.628.783.656	
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Menggal	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	Rp 2.788.596.206	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Menggal	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	Rp 2.788.596.206	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA					
	SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	Menggal	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Organisasi Wanita di Kabupaten Tulang Bawang	5 organisasi wanita	Rp 338.324.500	SUB KEGIATAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	Menggal	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Organisasi Wanita di Kabupaten Tulang Bawang	5 organisasi wanita	Rp 338.324.500	
	KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA					
	SUB. KEGIATAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	Rp 74.000.000	SUB. KEGIATAN PENGUATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	Rp 74.000.000	
	SUB. KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah dokumen pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	1	Rp 538.190.000	SUB. KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah dokumen pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	1	Rp 538.190.000	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA					KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA					
	SUB. KEGIATAN LAYANAN PENGADUAN ATAU PENJANGKAUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	12 orang	Rp 88.225.000	SUB. KEGIATAN LAYANAN PENGADUAN ATAU PENJANGKAUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	12 orang	Rp 88.225.000	

RENCANA KERJA DINAS PPPA TUBA

	KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	SUB. KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KTP DAN TPPO KEPADA PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	5 Lembaga	Rp 101.500.000	SUB. KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KTP DAN TPPO KEPADA PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	5 Lembaga	Rp 101.500.000	
	SUB. KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DALAM PENCEGAHAN KIP KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 79.388.450	SUB. KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DALAM PENCEGAHAN KIP KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	Rp 79.388.450	
	KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	70 orang	Rp 69.020.000	SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	70 orang	Rp 69.020.000	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	SUB. KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah	1 dokumen	Rp 50.000.000	SUB. KEGIATAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah	1 dokumen	Rp 50.000.000	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					
	KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA					
	SUB KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lembaga	Rp 230.074.500	SUB KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lembaga	Rp 230.074.500	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
	KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	SUB KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KTA KEPADA PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkat Kab/Kota	5 Kegiatan	Rp 129.550.000	SUB KEGIATAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN KTA KEPADA PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkat Kab/Kota	5 Kegiatan	Rp 129.550.000	
	KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	SUB KEGIATAN LAYANAN PENGADUAN ATAU PENJANGKAUAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	18 ORANG	Rp 141.915.000	SUB KEGIATAN LAYANAN PENGADUAN ATAU PENJANGKAUAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Menggal	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	18 ORANG	Rp 141.915.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan

komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan

kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yaitu “Terwujudnya SDM yang berkualitas” dengan sasarannya “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak” dan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan”. Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Dinas PPPA Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

2. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- Meningkatkan pemenuhan hak anak
- Menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	target
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	90,71
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	64,56
2	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	nilai	60,17
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	predikat	737
		Menurunnya Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Rasio KDRT	nilai	0,01
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan		Nilai Reformasi Birokrasi	predikat	BB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	nilai	67,66

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pemenuhan Hak Anak

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

D. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DINAS PPPA KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN			RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			
					LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA					PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA
		CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN		PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN				TOLOK UKUR	TARGET	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Rp 4.628.783.656				Rp 4.860.222.839	
2 08 01 2 02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH								Rp 2.788.596.206	APBD	WAJIB	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 2.928.026.016	
2 08 01 2 02 01	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	- Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan administrasi ASN	Menggala	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan administrasi ASN				23 ORANG		
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tenwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender												
02 08 02 202	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota													
02 08 02 202 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (IKAD, GOW, Politik, Parlemen, Dharma Wanita)		Pembinaan terhadap Organisasi Wanita di Kabupaten Tulang Bawang	Terlaksananya Pembinaan terhadap Anggota IKAD, Anggota Dharma Wanita Persatuan, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Kaukus Perempuan Parlemen, Kaukus Perempuan Politik	Kabupaten Tulang Bawang	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pembinaan terhadap Organisasi Wanita di Kabupaten Tulang Bawang	Terlaksananya Pembinaan terhadap Anggota IKAD, Anggota Dharma Wanita Persatuan, Gabungan Organisasi Wanita, Kaukus Perempuan Parlemen, dan Kaukus Perempuan Politik	Rp 338.324.500	APBD	WAJIB	Organisasi Wanita	5 Organisasi Wanita	Rp 355.240.725
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kabupaten/kota		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kabupaten Tulang Bawang	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Rp 74.000.000	APBD	WAJIB	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota yang	1 Lembaga	Rp 77.700.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Kabupaten Tulang Bawang	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Rp 538.190.000	APBD	WAJIB	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	23 Orang	Rp 565.099.500
02 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlindungi Perempuan dari Kekerasan												
02 08 03 201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
02 08 03 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Telah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Telah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Telah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Telah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 101.500.000	DAK NF	wajib	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 106.575.000
02 08 03 201 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 79.388.450	APBD	wajib	Jumlah Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	Rp 83.357.873

RENCANA KERJA DINAS PPPA TUBA

02	08	03	202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																Rp	92.636.250
02	08	03	202	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Tertaksananya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Tertaksananya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	88.225.000	DAK NF	wajib	Jumlah Layanan	44 layanan			Rp	
02	08	03	203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
02	08	03	203	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumilah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan	Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	jumilah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan	Tertaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	69.020.000	DAK NF	wajib	Jumlah SDM terlatih	70 Orang			Rp	72.471.000
02	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga																
02	08	04	201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
02	08	04	201	0007	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis, dan sosial	Kabupaten Tulang Bawang	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tertaksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis, dan sosial	Rp	50.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	WAJIB	Jumlah dokumen	1 Dokumen			Rp	52.500.000
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Terperuhnya Hak Anak																
2	08	06	201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2	08	06	201	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tulang Bawang	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Tertaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	230.074.500	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	WAJIB	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga (FAD dan Puspage)			Rp	241.578.225
02	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terlindungi Anak dari Kekerasan																
02	08	07	201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																	
02	08	07	201	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota	Kab. Tulang Bawang	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tertaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota	Rp	129.550.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	wajib	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota	5 Kegiatan			Rp	136.027.500
02	08	07	202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
02	08	07	202	0008	Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tertaksananya Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tulang Bawang	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Tertaksananya Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	141.915.000	DAK NF	wajib	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan Atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	18 Orang			Rp	149.010.750

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2025.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

RINA KUSUMAWARDANI, S.T.P., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19721227 201001 2 001